

Manajemen Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Amanah Ummat Makassar

Harlinda MA^{1*}, Muhlis Madani², Muhammad Tahir³

¹⁾Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

³⁾Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine the implementation of the logistics management function at the Office of Population and Civil Registry of Makassar City which focused on four functions, namely the planning function, the budgeting function, the procurement function and the elimination function. This type of research used qualitative descriptive research type that was not intended testing certain hypotheses but to find a picture of logistics management. As for the results of this study showed that the planning function indicators were categorized as good because they were structured. The implementation function had been categorized quite well because it was carried out every Saturday and Sunday. Then in organizing, the organizing function was categorized as good, because in essence when a decision was made by deliberation. PKBM Management on Makassar.

keywords: *management, community learning activity center, management function community learning activity center*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari fungsi manajemen logistik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang berfokus pada empat fungsi yaitu fungsi perencanaan, fungsi penganggaran, fungsi pengadaan dan fungsi penghapusan. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu melainkan untuk menemukan gambaran mengenai manajemen logistik. Adapun hasil penelitian dari indikator fungsi perencanaan sudah dikategorikan baik karena sudah terstruktur. Fungsi pelaksanaan sudah dikategorikan cukup baik karena dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu. Kemudian dalam pengorganisasian, fungsi pengorganisasian dikategorikan baik, karena pada hakikatnya apabila dilakukan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah. Manajemen PKBM pada pengawasan dikategorikan baik karena dilakukan oleh pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Makassar.

kata kunci : manajemen, pusat kegiatan belajar masyarakat, fungsi manajemen pusat kegiatan belajar masyarakat

* harlinda@gmail.com

PENDAHULUAN

Di Indonesia sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan terutama untuk masyarakat menengah kebawah. Mahalnya biaya pendidikan menjadi faktor utama yang membuat mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak sekalipun hanya sekolah dasar. Padahal pendidikan merupakan sektor penting yang berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan bangsa. Pada tahun 2004/2005 menurut Badan Pusat Statistik terdapat sekitar 1.471.838 anak usia sekolah yang tidak sekolah lagi. Ada kecenderungan anak-anak putus sekolah ini akan menjadi penganggur dan pekerja kasar. Anak-anak jalanan dan tidak mampu ini dalam kehidupan sehari-hari harus bekerja membantu orang tuanya mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Anak-anak ini harus kehilangan haknya untuk bersekolah dan bermain bersama teman sebayanya dengan penuh keceriaan dan kegembiraan selayaknya dunia anak-anak dan terpaksa harus pula meninggalkan cita-citanya dengan bekerja, karena orang tua mereka tidak mampu memikul biaya-biaya untuk membeli

buku, pakaian seragam dan keperluan sekolah lainnya. Anak-anak ini juga beresiko untuk bertumbuh sebagai orang-orang yang berpendidikan rendah bahkan buta huruf sehingga kemungkinan besar mereka menjadi orang-orang miskin masa depan dan akan menjadi generasi yang hilang (*lost generation*) yang tidak pernah terlepas dari masalah seperti kekurangan gizi, pelacuran usia dini yang sangat rentan dengan *HIV / AIDS* serta tindak kriminalitas. Untuk mengatasi ledakan anak putus sekolah atau paling tidak untuk mengatasi masalah sosial yang mungkin akan timbul perlu adanya layanan pendidikan yang dapat menyentuh masyarakat hingga lapisan bawah, dimana pendidikan tidak hanya memusatkan pada jalur pendidikan formal saja, melainkan melalui jalur pendidikan lain yaitu non formal dan pendidikan informal. Salah satunya dengan pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu dari pendidikan non formal adalah program yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B dan Paket C.

Penyetaraan hasil belajar pendidikan kesetaraan diatur oleh Pasal 26 ayat (6) UU Sisdiknas 20/2003:

“Pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan”. Penelitian Hendrowanto Nibel (2007) yang berjudul “Keikutsertaan Warga Belajar pada Program Kejar Paket C” (Studi Kasus PKBM Mendawai dan PKBM Tilung Raya) menyimpulkan bahwa : 1. PKBM Mendawai: lokasi sangat mendukung, antusiasme dan semangat belajar wargabelajar tinggi, tutor memiliki ijazah S1 dan DII sesuai dengan jurusan pendidikan, sarana administrasi minimal telah dipersiapkan dalam setiap kelompok, terjalinnya hubungan yang harmonis antara tutor dengan wargabelajar, adanya evaluasi proses dan hasil belajar untuk mengetahui besarnya daya serap warga belajar, 2. PKBM Tilung Raya: lokasinya jauh dari pemukiman penduduk dan tidak ada transportasi yang mendukung, rendahnya minat warga belajar, tenaga pengajar tidak sesuai dengan pendidikan/profesi, hubungan yang renggang antara tutor dan pihak pengelola serta warga belajar, warga belajar rata-rata menengah ke bawah hal ini dapat mempengaruhi tingkat kehadiran

mengikuti Program Kejar Paket C karena disamping itu mereka bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

“Pendidikan Non Formal, dikelola padamasyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang menjadi pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal pada rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.”

Oong Komar (2006:205), sifat penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada jalur pendidikan non formal berbeda dengan jalur pendidikan sekolah, ciri utama yang membedakannya adalah keluwesan penyelenggaraan pendidikan yang berkenaan pada waktu atau lama belajar, serta usia peserta didik, isi pelajaran, dengan penyelenggaraan pengajaran atau penilaian hasil belajar.

Pendidikan non formal memiliki waktu yang lebih fleksibel jika dibandingkan dengan jalur pendidikan formal, waktunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar. Usia peserta didik juga tidak memiliki batasan yang khusus, usia peserta didik saat mengikuti sistem pendidikan bervariasi dari yang muda sampai yang tua.

Pendidikan non formal sebagai sebuah sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pengembangan dan implementasi belajar sepanjang hayat.

Menurut pendapat Saleh Marzuki (2012:141), tugas pendidikan non formal adalah: (1) sebagai persiapan memasuki dunia sekolah; (2) sebagai suplemen dan penambah pelajaran karena mata pelajaran yang dilakukan di sekolah terbatas; (3) sebagai perlengkapan pada peserta yang dididik karena kecakapan tertentu memang belum diajarkan pada sekolah namun dapat dipandang perlu, sementara kurikulum di sekolah tidak mampu menampungnya; (4) sebagai pengganti (substitusi) karena anak-anak yang tidak pernah sekolah yang harus memperoleh kecakapan sama atau setara dengan sekolah.

Kondisi seperti inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Manajemen Kesetaraan Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat karena layanan informasi dan sarana prasarana masih kurang baik, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Padahal, Informasi Kesetaraan Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sangat dibutuhkan masyarakat. Maka dari itu

penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul “ Manajemen Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Amanah Ummat Makassar”.

Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Menurut Terry (2013: 1) yang mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang - orang ke arah tujuan - tujuan organisasional atau maksud - maksud yang nyata.

Manajemen pendidikan adalah keseluruhan dari suatu proses penyelenggaraan dalam usaha kerja sama dua orang atau lebih dan atau usahabersama untuk mendayagunakan semua sumber (personal maupun materil) secara efektif, efisien, dan rasional untuk mencapai tujuan pendidikan (Akdon, 2009:21).

Pada dasarnya, fokus manajemen pendidikan adalah tujuan, manusia, sumber dan juga waktu. Kalau digabungkan dan dilihat dari bentuk dan prilakunya, keempat unsur tersebut menampakkan dirinya sebagai suatu satuan sosial tertentu, yang disebut organisasi.

Dasar Hukum utama penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Terry (2013 : 43) perencanaan diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai pada masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan - tujuan itu.

Menurut Arikunto,dkk (2008:9) perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana optimal.

Menurut Syaefudin dan Syamsuddin (2007:27), perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan yang menyiapkan dan menentukan seperangkat keputusan mengenai apa yang diharapkan dan apa yang akan dilakukan. Sedangkan

menurut Muhammad Rosni yang artinya, Pada tahap perencanaan, tahap perencanaan merupakan tahap yang paling kritis dan penting dalam penelitian tindakan karena pada tahap ini, peneliti harus jelas memahami situasi bermasalah atau fenomena.

Menurut Fatah (2009:2), perencanaan merupakan suatu yang menetapkan tujuan ataupun kerangka tindakan yang diinginkan agar tercapainya tujuan tertentu yang dilaksanakan dengan mengkaji kelemahan dan kekuatan dalam organisasi, menetapkan kesempatan atau ancaman, menetapkan strategi, kebijakan, taktik atau program.

Menurut Terry (2013 : 82) pengorganisasian adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan itu.

Menurut Arikunto,dkk (2008:10) pengorganisasian adalah usaha untuk mewujudkan kerjasama antar manusia yang terlibat kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Usman (2009:146) menambahkan bahwa pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang

melingkupinya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengorganisasian pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana - rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya.

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dari perencanaan yang telah dilakukan dengan proses yang matang atau terperinci, implementasi dilaksanakan sesudah perencanaan siap.

Menurut Fatah (2009:2), fungsi pelaksanaan meliputi menentukan fungsi, hubungan dan struktur. Fungsi berupa tugas yang dibagi dalam fungsi garis, staff, dan fungsional.

Menurut Sutarto (2008:48), dalam penggunaan sumber belajar tersebut peserta didik harus diarahkan oleh tutor. Jadi tutor bukan hanya satu satunya sumber belajar melainkan ada sumber lain yang dapat dimanfaatkan (by utilization) untuk perluasan pemahaman dan pengalaman peserta didik.

Menurut Terry (2013 : 9) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan kegiatan untuk mengukur pelaksanaan tujuan, menentukan sebab - sebab penyimpangan penyimpangan dan mengambil tindakan - tindakan korektif bila perlu.

Menurut Arikunto, dkk (2008:13) pengawasan adalah usaha pimpinan

untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya untuk mengetahui kerja para pegawai dalam melakukan tugas mencapai tujuan.

Menurut Nurhalim (2014:21), tahap - tahap pengawasan dalam proses belajar adalah: 1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibandingkan dengan rencana. 2) Melaporkan penyimpangan tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar atau saran. 3) Menilai pekerjaan yang dilakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan - penyimpangan.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli hingga September 2019. Adapun yang menjadi penentuan lokasi penelitian adalah Kantor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Amanah Ummat Borong Raya Makassar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian adalah penelitian deskriptif yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu melainkan untuk menemukan gambaran mengenai manajemen PKBM.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Ketua PKBM,

KTU PKBM, Pengawas, dan Peserta. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi dengan para informan untuk memperoleh data dengan menggunakan daftar yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dan diperoleh langsung dari sumber aslinya, melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, melalui proses studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, dokumen yang diperoleh dari lokasi tempat penelitian. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak wilayah Kota Makassar terletak di pesisir pantai Barat bagian selatan pulau Sulawesi. Secara geografis, Kota Makassar berada pada garis Lintang antara 05°31'30,"81-05°14'6,"49 LS dan garis Bujur antara 119°28;19"-119V32;31"BT. Wilayah Kota Makassar yang berbatasan langsung

dengan Selat Makassar mempunyai garis pantai sepanjang 32 km yang membentang dari arah Selatan ke Utara, membujur ke arah Timur Laut. Wilayahnya mencakup beberapa pulau, diantaranya ada 13 pulau yang mempunyai nama, yaitu : Pulau Kayangan, Pulau Lae-Lae, Pulau Lanjukang, Pulau Barangkeke, Pulau Kodinga Renglompo, Pulau Samalona dan Pulau-pulau kecil lainnya.

Secara administratif Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai luas wilayah 17.577 Ha atau 0,28 % dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terdiri dari 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Dari 14 Wilayah Kecamatan, Kecamatan Tamalate merupakan wilayah terluas yaitu 1,997 Ha dan Kecamatan Mariso yang merupakan wilayah Kecamatan terkecil dengan luas wilayah 0,182 Ha.

Manajemen pendidikan kesetaraan kejar paket c pusat kegiatan belajar masyarakat adalah dimana merupakan salah satu lembaga yang berfungsi sebagai wadah dalam memberikan kesempatan penuh kepada seluruh masyarakat agar mampu, memberdayakan masyarakat agar mandiri dan berswadaya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan

pengembangan atau pembangunan masyarakatnya.

Program ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dimana mampu memberi solusi yang tepat, melalui proses pembelajar masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, untuk itu maka sangat diperlukan manajemen pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) agar mampu atau terampil untuk melakukan suatu kegiatan bersama orang lain atau melalui orang lain agar tercapai tujuan, oleh karena itu pengelola PKBM dapat berkerja sama sebagaimana pengelolaan atau manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya menerapkan fungsi – fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Fungsi perencanaan ini adalah proses mempersiapkan rangkaian keputusan untuk mengambil tindakan pada waktu yang akan datang agar tercapainya tujuan. perencanaan ini dilakukan untuk menyusun rangkaian tindakan atau kegiatan agar mencapai tujuan yang diawali dengan kegiatan identifikasi dimana dijelaskan identifikasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan warga masyarakat. Manajemen pusat kegiatan belajar masyarakat juga dilakukan

dengan langkah langkah atau sumber sumber agar menentukan yang diharapkan tercapai dan dapat dilihat juga sebagaimana pentingnya perencanaan dalam pusat kegiatan belajar masyarakat dimana pada hakikatnya bahwa perencanaan sebagai penetapan sasaran yang ingin dicapai dan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapainya.

Berdasarkan data dan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perencanaan pusat kegiatan belajar masyarakat amanah ummat borong raya makassar dilakukan sebelumnya langkah langkah sumber daya manusia yang perlu dibenahi agar dapat memperjelas kepada masyarakat tentang pusat kegiatan belajar masyarakat tentang kegiatan atau pembelajaran yang dilakukan sebagaimana perencanaan yang dilakukan sesuai dengan sarana atau prasarana agar tercapainya suatu tujuan pusat kegiatan belajar masyarakat amanah ummat borong raya makassar. Kemudian pusat kegiatan belajar masyarakat yang melakukan pengembangan suatu pusat kegiatan belajar masyarakat yaitu pengurus PKBM dan Tutor yang dimana sudah terarahkan oleh ketua PKBM sesuai visi dan misi PKBM Amanah Ummat Borong Raya

Makassar agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Fungsi pengorganisasian adalah merupakan kegiatan atau menyiapkan dan menggerakkan sumber daya yang teridentifikasi, mengkaji atau menata sumber daya yang akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan program kegiatan. Fungsi ini menyangkut dengan pusat kegiatan belajar masyarakat dimana ciri ciri organisasi yaitu merupakan upaya pemimpin atau pengelola untuk memadukan sumber daya manusia, pengorganisasian juga merupakan kegiatan untuk menghimpun dan menyusun sumber daya manusia sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas menunjukkan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tidak mengharuskan berapa jumlah peserta karena tidak menentukan jumlah peserta, kemudian tugas pengurus harus membuahi pusat kegiatan belajar masyarakat sesuai visi dan misi, dan dimana tutor mempunyai tugas dengan kerangka pembelajaran berdasarkan silabus, dan setiap keputusan yang diambil dalam

organisasi pusat PKBM dilakukan dengan musyawarah agar mendapatkan titik terang dari setiap pendapat masing masing bidang PKBM, kemudian dalam melakukan suatu aktifitas dari setiap anggota PKBM harus sesuai dengan visi dan misi agar tercapainya tujuan.

Fungsi pelaksanaan dalam manajemen PKBM tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui pengorganisasian yang baik, pelaksanaan pusat kegiatan belajar masyarakat telah terlaksana dengan baik meskipun apa yang telah direncanakan tidak semua terealisasi karena sebagian sumber daya manusia dilaksanakan sendiri dan sebagian juga berkerja sama dengan forum PKBM.

Berdasarkan data dan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pusat kegiatan belajar masyarakat amanah ummat borong raya makassar menggunakan 4 metode pembelajaran yaitu metode tutorial, metode diskusi, metode praktek, metode belajar mandiri, dan metode penugasan. Kemudian hal hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pusat kegiatan belajar masyarakat dimana mengembangkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dengan memotivasi, pelaksanaan pusat kegiatan belajar

masyarakat juga dilakukan pada setiap proses pembelajaran yang dimana dilakukan pada hari sabtu atau minggu di ruang sekretariat atau kantor PKBM Amanah Ummat Borong Raya Makassar.

Pengawasan adalah salah satu kunci keberhasilan dalam seluruh proses pendidikan, pengawasan merupakan monitoring pada kegiatan yang bertujuan untuk menentukan harapan yang nyata yang akan dicapai terhadap apa yang terjadi, karena semua fungsi yang terlebih dahulu baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan perlu melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Makassar untuk mengetahui kehadiran peserta didik dan kemudian pengawasan juga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar oleh pengurus PKBM sendiri dan untuk ujian akhir paket a, b dan c itu dari Dinas Pendidikan Makassar. Adapun Faktor Pendukung yaitu Faktor yang menjadi pendukung dalam manajemen pendidikan kesetaraan kejar paket c pusat kegiatan belajar masyarakat amanah ummat borog raya makassar

adalah sebagai berikut : 1) Sumber Daya Manusia Keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya salah satunya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, dalam hal ini pegawai atau aparaturnya dalam organisasi tersebut. Sumber daya manusia yang dimaksud disini berkaitan dengan kuantitas dan kualitas berupa kemampuan pengurus PKBM dalam manajemen pendidikan kesetaraan kejar paket c pusat kegiatan belajar masyarakat amanah ummat. Kemampuan sumber daya yang dimiliki PKBM terdiri dari kemampuan untuk merencanakan kejelasan kepada masyarakat. Faktor Penghambat Konsep Belajar yaitu masih menjadi tugas besar bagi pengurus dan tutor PKBM Amanah Ummat Borong Raya Makassar untuk memberikan pemahaman mengenai konsep belajar sepanjang hayat bagi peserta belajar agar dapat mengetahui lebih jelas tentang kegiatan belajar

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah digambarkan pada bagian sebelumnya, maka peneliti akan membahas daata-data yang diperoleh , dikaitkan dengan kajian kepustakaan atau referensi dalam penelitian ini. Berikutakan dipaparkan lebih jelas dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti.

Manajemen Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Amanah Ummat Borong Raya Makassar masih tergolong belum optimal meskipun terdapat beberapa alasan-alasan mengenai hal tersebut. Keempat fungsi manajemen yang menjadi fokus kajian peneliti pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Amanah Ummat Borong Raya Makassar mulai dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan.

Perencanaan pusat kegiatan belajar masyarakat amanah ummat borong raya makassar dimulai dengan rencana awal yaitu membenahi sumber daya manusia pada masyarakat agar dapat memperjelas bagaimana kegiatan belajar yang ada. Hal tersebut sesuai yang dikatakan Alder (Rustiadi, 2008: 339) bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. PKBM Sebagai Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan Luar Sekolah. Pembangunan pendidikan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berlangsung dalam proses budaya, sehingga dapat

meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang berkualitas itu harus diselaraskan dengan upaya mewujudkan pembentukan identitas bangsa. Dengan demikian manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang mempunyai kapabilitas dan kemandirian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, pelaksanaan pendidikan tidak sederhana. Keragaman letak geografis bangsa dengan aneka ragam budaya, adat istiadat, dan bahasa, menuntut adanya isi dan pola pelaksanaan pendidikan yang tidak seragam. Keragaman keperluan orang Indonesia yang berlatar-belakang lingkungan alam dan pekerjaan yang berbeda menuntut pula adanya isi dan pola layanan yang berbeda.

Karakteristik pendidikan serupa itu, menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan memerlukan dukungan sumber daya yang memiliki kompetensi manajerial kependidikan. Orang yang melakukan tugas mengelola pendidikan perlu dibekali dengan ilmu manajemen pendidikan. Ilmu manajemen pendidikan merupakan kajian terhadap pendayagunaan berbagai potensi dalam upaya pengembangan potensi sumber daya manusia untuk tumbuh secara

optimal melalui proses belajar, dengan memanfaatkan kurikulum, dan mempergunakan metodologi dan media pendidikan yang selalu berkembang dan dikembangkan. Kekhasan tersebut, merupakan proses yang sangat berbeda dari proses pengelolaan kegiatan lainnya. Dalam beberapa hal mungkin memiliki kesamaan dengan pengelolaan lembaga yang lain, bahkan mengadopsi dan atau mengadaptasi teori dan prinsip dari ilmu-ilmu lain, misalnya dari sosiologi dan psikologi, tetapi secara hakiki tetap berbeda dari sistem pengelolaan yang lain tersebut.

Dalam UU.No.2 Tahun 1989 dan PP No.38 Tahun 1992 jo UU.No.20 Tahun 2003, ditemukan istilah-istilah pengelolaan pendidikan, pengelolapendidikan, penyelenggaraan pendidikan, pengawasan, dan penilaian pendidikan. Pada dasarnya istilah-istilah tersebut adalah merupakan penjabaran dan pengimplementasian konsep-konsep administrasi pendidikan dalam penatalaksanaan semua komponen sistem pendidikan ke arah tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Berpijak pada ketentuan perundangan dapat dibedakan adanya dua macam pengelolaan pendidikan, yaitu: (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pengelolaan sistem

pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional. Karena Diknas mempunyai susunan organisasi sampai ke tingkat bawah, maka keseluruhan jajaran Diknas tersebut termasuk pengelola pendidikan sesuai dengan posisinya dalam organisasi Diknas. Dalam hal inipengelolaan pendidikan sebagai suatu sistem dalam skala nasional. Dalam skalakecil terdapat satuan-satuan pendidikan sebagai sub sistem dalam pengelolaan pendidikan yang disebut: (2) Pengelolaan satuan pendidikan. Satuan Pendidikan adalah satuan pelaksana kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Yang termasuk satuan pendidikan ini adalah Sekolah, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Keterampilan/kursus, Kelompok Belajar, dan sebagainya. Berkenaan dengan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur luar sekolah, khususnya pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam sistem pendidikan nasional tersurat dalam Undang-undang Sistem pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Dalam Bab IV UU.No.2 Tahun 1989 yang menyatakan mengenai satuan

jalur dan jenis pendidikan; Pasal 9 ayat 1 menyiratkan bahwa satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan sejenis. Dalam PP.No.73, Bab III, pasal 3 ayat 1, bahwa “jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan”. Pasal ini mengisyaratkan bahwa sebagai PLS, PKBM merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang dapat menyelenggarakan satuan-satuan pendidikan luar sekolah. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dalam bentuk PKBM merupakan arah baru dalam sistem pendidikan luar sekolah yang memiliki visi untuk memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. “PKBM adalah suatu wadah dari berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya”. (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, 2001). PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh

masyarakat yang pembentukannya dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber potensi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan terutama jumlah kelompok sasaran dan jenis usaha/keterampilan yang secara ekonomi, sosial dan budaya dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga belajar khususnya dan warga masyarakat sekitarnya.

Secara umum pembentukan PKBM bertujuan untuk memperluas kesempatan masyarakat khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah. Sejalan dengan visi pembentukan PKBM tersebut maka tugas pokok PKBM adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu untuk mengembangkan diri melalui penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dalam suatu wadah terpusat yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat dan diharapkan dapat tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat sendiri, sehingga akan lebih berorientasi pada kebutuhan belajar masyarakat setempat yang pada akhirnya mampu menjadikan PKBM sebagai suatu wadah pembelajaran

berkelanjutan. Sebagai tempat pembelajaran dan tempat sumber informasi bagi masyarakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat PKBM memiliki banyak fungsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat (2002) menentukan lima fungsi PKBM, yaitu: Sebagai tempat kegiatan belajar bagi warga masyarakat, Sebagai tempat pusran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat, Sebagai sumber informasi yang handal bagi warga masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional, Sebagai yang tukar-menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional di antara warga masyarakat, Sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Sementara Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (2001) menentukan bahwa PKBM memiliki dua fungsi yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung. Adapun fungsi utama PKBM menurut Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (2001) adalah “Sebagai wadah berbagai kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan diri

dan masyarakat”. Sedangkan Fungsi Pendukungnya adalah: Sebagai pusat informasi bagi masyarakat sekitar, lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, Pusat jaringan informasi dan kerjasama bagi lembaga yang ada di masyarakat (lokal) dan lembaga di luar masyarakat, Sebagai tempat koordinasi, konsultasi, komunikasi dan bermusyawarah para pembina teknis, tokoh masyarakat dan para pemuka agama untuk merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Sebagai tempat kegiatan penyebarluasan program dan teknologi tepat guna.

Berlakunya UU.No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU.No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menuntut penanganan berbagai masalah, yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat, termasuk masalah pendidikan yang selama ini ditangani secara sentralistik diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Adanya perubahan tersebut menuntut perubahan di dalam manajemen pendidikan secara keseluruhan. Sehingga pemerintah kabupaten atau kota mempunyai wewenang penuh untuk mengelola pendidikan secara

mandiri dengan memberdayakan semua potensi yang ada di daerah. Dengan adanya perubahan manajemen pendidikan ini diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai Manajemen Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Amanah Ummat Borong Raya Makassar maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang menjadi fokus penelitian yang meliputi: 1) Fungsi perencanaan, perencanaan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Amanah Ummat Borong Raya Makassar sudah dikategorikan baik, karena perencanaan dalam membenahi sumber daya manusia sudah dilakukan agar memperjelas masyarakat untuk mempermudah mengetahui tentang pusat kegiatan belajar. 2) Fungsi Pengorganisasian, pengorganisasian pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Amanah Ummat Borong Raya Makassar dikategorikan baik, karena apabila dalam melakukan kegiatan pembelajaran diadakan musyawarah dalam bidang yang terlibat pada kegiatan pembelajaran agar tercapainya

tujuan sesuai visi dan misi. 3) Fungsi pelaksanaan, pelaksanaan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Amanah Ummat Borong Raya Makassar dikategorikan baik, karena proses dalam melaksanakan pembelajaran yang dilakukan bisa dimana saja karena tidak mesti harus berada dalam ruangan dan melaksanakan kegiatan belajar dijadwalkan pada hari sabtu dan minggu. 4) Fungsi pengawasan, pengawasan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan kemudian untuk ujian akhir peserta yang melakukan pengawasan oleh pengawas Dinas Pendidikan Kota Makassar

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. 2009. *Strategic Management for Educational Management*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, dkk. 2008. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Paktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metedologi Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fatah, Nanang. 2009. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Roksdaya.
- Kamil, Mustofa. 2011. *Pendidikan Non Formal Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran dari Kominka di Jepang)*. Bandung: Alfabeta.

- Komar, Oong. 2006. Filsafat Pendidikan Nonformal. Bandung: Pustaka Setia.
- Marzuki, Saleh. 2012. Pendidikan Nonformal. Cetakan Kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- .Nibel, Hendrowanto. 2007. Keikutsertaan Warga Belajar Pada Program Kejar Paket C (Studi Kasus di PKBM Kejar Mendawai dan PKBM Tilung Raya di Kota Palangka Raya). Artikel Pendidikan Network.
- Nurhalim, Khomsun. 2014. Strategi pembelajaran Non Formal. Semarang: UNNES Press
- Sutarto, Joko. 2008. Pendidikan Nonformal: Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat. Semarang: UNNES Press.
- Syamsuddin M, Syaefuddin. 2007. Perencanaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Terry. 2013. Dasar - dasar Manajemen, (Terje : G.A Ticoalu), CV. Alfabeta, Bandung
- Usman, Husaini. 2011. Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.